

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) adalah dengan cara melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen dan merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di maksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kerjanya, serta mempermudah atasan instansi untuk melakukan evaluasi.

Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres

tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing. Lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan memberikan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dan unit kerja sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini (Menpan dan RB,2012).

Kinerja pemerintah daerah adalah capaian-capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu diketahui agar dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan sasaran dan target tertentu dan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi SAKIP serta memberikan penilaian terhadap implementasi sisitem AKIP per periode , untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul **“Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013-2015 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok ”**.

Dengan diangkatnya judul ini diharapkan instansi yang bersangkutan dapat membantu atau bekerjasama dengan penulis dalam pembuatan tugas akhir.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) kabupaten solok yaitu :

1. Bagaimana evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok tahun 2013-2015 setiap periodenya?
2. bagaimana perbedaan-perbedaan pencapaian kinerja tersebut per periode berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013-2015?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

1. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja agar tidak canggung dalam menghadapi dunia kerja.
2. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapatkan dari ilmu perkuliahan kelapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Universitas Andalas.
3. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh di tempat kuliah lapangan untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi

Universitas Andalas dan dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dengan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan penerapan secara nyata dalam dunia kerja.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui bagaimana pencapaian kinerja Instansi pemerintah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok tahun 2013-2015
- b) Untuk mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaan pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis tersebut per periode berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solok tahun 2013-2015.
- c) Untuk mengetahui informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip *good governance* termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggungjawab dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Solok.
 - b. Dapat mengetahui pencapaian-pencapaian yang didapatkan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.
 - c. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja.
 - d. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian melalui pengalaman kerja.

2. Bagi tempat instansi terkait
 - a. Dengan adanya peserta magang lebih meringankan tugas-tugas pegawai dan dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang melakukan magang.
 - b. Terwujudnya kerjasama yang baik antara instansi pendidikan dengan instansi tempat magang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri sub-sub bab yang membagi kesatuan kerangka, karangan, pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang dan perumusan masalah tujuan dan manfaatPenulisan, sistematika penulisan.

BAB II LandasanTeori

Merupakan landasan yang membahas teori yang menguraikan secara detail mengenai pengertian evaluasi, fungsi dan manfaat evaluasi kinerja, pengertian laporan, pengertian akuntabilitas, pengertian kinerja, pengertian pengukuran kinerja, manfaat pengukuran kinerja, pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, prinsip LAKIP, manfaat LAKIP, fungsi LAKIP, tujuan LAKIP, pokok pembahasan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,waktu penyampaian LAKIP, dasar hukum pemberlakuan LAKIP , pokok pembahasan evaluasi laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tujuan pelaksanaan evaluasi LAKIP, metode evaluasi LAKIP.

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini berisi gambaran umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Solok yang terdiri dari tugas pokok dan fungsinya, visi dan misi, tujuan serta tugas pokok dan fungsi unit Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok.

BAB IV Pembahasan

Berisi pembahasan pencapaian kinerja instansi pemerintah dilihat dari Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013-2015 serta perbedaan pencapaian kinerja tiap tahunnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang dilakukan penulis dan saran.

